DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami,* Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1992.

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis,* Kencana, Jakarta, 2006.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Pengantar dan Asas-Asasnya,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Al-Imam Jalaluddin Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhoir,* Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, 2005.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2018.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

A.Z Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.

_____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara,* PT Alumni, Bandung, 2017.

Baharudin Lopa, *Pemberantasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Alumni, Bandung, 1987.

Bruggink, JJ.H., ReÁ eksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, Penerjemah: Arief Sidharta, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

_____, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2017.

E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum,* Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2021.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni, Jakarta, 1982.

Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft, Volume 7-8* Quelle & Meyer, 1929.

Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana – Perkembangan dan Penerapannya,* Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus,* Ctk. Kesatu Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

Ibrahim Anis, et. Al, *Al-Mujam Al-Wasit,* Cetakan Kedua, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, Mesir, 1972.

Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab,* Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana,* Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Ctk.Kedua, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*: *Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya,* Alumni, Bandung, 2007.

L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht / Pengantar Ilmu Hukum, terj.* Oestarid Sadino, cet. Ke-23, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Martadha Muthahhari, *Islam dan Tantangan Zaman,* Pustaka Hidayah, Bandung, 1996.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT RINEKA CIPTA, 2015.

_____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, 1983.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, edisi pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* Amzah, Jakarta, 2018.

Pompe, *Handboek van het Nederlands Strafrecht,* Revisi Keempat, Naamloze Vennootschap, Zwolle, 1953.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum pidana, S*inar Baru Algensindo, Bandung, 1997.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

_____, *Tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Pidana Kontemporer,* Prenada Media, Bandung, 2019.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,* Politea, Bogor, 1984.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum,* UI Press, Jakarta, 1982.

_____ , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1984.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. 9, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat,* Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Edisi Kelima, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer,* LP3ES, Depok, 1986.

Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,*Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia-Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan,* Gramedia Pustakan Utama, Jakarta, 2009.

Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,* UII Press, Yogyakarta 1999.

JURNAL

Juridische Jurnal Penelitian Hukum, Edisi No. 2 Vol. 2, 2025.

JEM Terekam Jejak, Edisi No. 3 Vol. 2, 2025.

Jurnal Yudisial, Edisi No. 2 Vol. 13, 2020.

Jurnal Equality, Edisi No.1 Vol. 11, 2006.

Jurnal Rechtens, Edisi No. 1 Vol. 10, 2021.

Jurnal Diskursus Islam, Edisi No. 2 Vol, 2013.

Jurnal Media Akademik, Edisi No. 11 Vol. 3, 2024.

Jurnal Pamator, Edisi No. 2 Vol. 3, 2010.

Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam, Edisi No. 1 Vol 8, 2023

Environmental Law Journal, Edisi No. 2 Vol. 7, 2011.

MAKALAH

Muladi, ”Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum,” Makalah disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Intensifikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006.

KARYA ILMIAH LAIN

Roni Saputra, Totok Dwi Diantoro, “Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif”, Indonesian Corruption Watch, Policy Paper Kerugian Ekologis V3, Jakarta, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

INTERNET

Eddy O.S Hiariej, "*Lex Specialis Dalam Hukum Pidana"*, KOMPAS, 2018. https://www.kompas.id/artikel/lex-specialis-dalam-hukum-pidana/. Diakses terakhir pada 23 Juni 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. "Delik". *https://kbbi.web.id/delik*. Diakses terakhir pada 23 Juni 2026.